

BAB.I

PENGERTIAN PARTAI POLITIK DAN PEMILU

A. Pengertian Partai Politik

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju. Menurut Lapalombra dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Menurut Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Carl J. Friedrich (1967:415) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun material.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi.
2. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan
3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum
4. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antar anggota partai politik.

B. PERANAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah :

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang diperintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pembuat kebijakan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan –kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau

ideologi yang dianutnya. Misalnya negara yang mengutamakan paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang mengutamakan paham otoritas pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentarakan atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak ditujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai

politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

5.Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah.

6.Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus.

7.Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik . Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional

baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat.

Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik . yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah idiologi yang digunakannya untuk menganlssi dan mnyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki system idiologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

8.Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social . masing-masing mmiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang bereda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekansime control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskana AD&ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk prilaku yang sesuai dengan apa yag di ingnkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu degan individu yyang lainnya. Mislanya membangun komunikasi dan saling melakukan sering informasi anatar satu dengan yang lainnya. Tujuan utmanya adalah adanya keterkaiatan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

9. Profesionalisme Partai Politik

Sistem persaingan politik dan control media masa membuat partai politik perlu melakukan transformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang di seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga perlu dipikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (sustainable). Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya.

Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standard dan ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentang system rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemuluan ketua partpol, dan pemilihan calon partai harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah disepakati bersama.

Sementara profesionalisme politisi ditunjukkan dengan sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila tidak tertata system dan prosedur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan dengan membenahan struktur internal partai politik. Memanag secara umum profesionalisme partai politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sulit untuk mengharapakan elit partai untuk focus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau tidak dibaringi dengan imblan ekonomi. Sehingga perlu ada desaian system remunerasi bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan struktur dalam infrastruktur partai politik, sehingga dapat membantu mereka dalam berkonsentrasi dan focus pada tugas dan

tanggungjawab sebagai elit partai atau politisi. Tentunya hal ini diharapkan dapat membantu partai politik dan politisi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

B.Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Indria Samego pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai politik), dan calon kepala daerah dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbetuk face to face (tatap muka) atau loby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji –janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Menurut Huntington (1991:9) dalam (Arifin,2014:85) pemilihan umum yang bebas merupakan definisi minimal demokrasi, yang mengharapkan lahirnya tindakan politik atau perilaku politik pemilih sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara. Keikutsertaan warga negara memberikan suaranya dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi minimal. Namun selalu saja ada orang-orang yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu.

Menurut Betham (1994) dalam Anwar Arifin¹ Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan priodik, adanya akuntabilitas publik (pertanggungjawaban) negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Diamond (2003) dalam Anwar Arifin, (2014:78-79), menulis bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.

Pemilihan umum menurut Cole adalah sarana kompetisi untuk meraih tampik kekuasaan di pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah kontrak sosial antara masyarakat dan negara atau pemerintah. Dalam teorinya Thomas Hobes tentang kontrak sosial, bahwa proses pembentukan negara di dasarkan pada kontrak sosial antara masyarakat dan negara. Karena manusia adalah makhluk sosial secara alamiah cenderung menciptakan kekacauan sehingga perlu adanya negara atau pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan Hobes bahwa masyarakat dalam konteks ini individu-individu, dan kelompok memberikan kekuasaan politik kepada negara atau pemerintah untuk mengatur hidup masyarakatnya agar tercipta keadilan, ketenraman, dan kesejahteraan.

Bagi Hobes , hanya terdapat satu macam kontrak politik yaitu pemerintahan dengan jalan mana segenap individu menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah, kepada seorang atau sekelompok orang yang di tunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Negara atau pemerintah harus di berikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi atau di saingi oleh kekuatan apapun.

Dari pemikiran tentang kontrak politik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, tentang teori kontrak politik, dapat dipahami bahwa kontrak politik antara masyarakat dengan negara atau pemerintah, dalam rangka pembentukan negara dan pelaksanaan kekuasaan politik, berdasarkan pada suara mayoritas dalam proses yang demokratis. Bentuk kontrak politik terlihat pada penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis. Yaitu setiap individu memiliki kebebasan dan kesetaraan untuk memberikan kedaulatannya pada kandidat yang mencalonkan diri baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Parlemen maupun sebagai kepala daerah dan wakil Kepala daerah.

BAB.II

PERKEMBANGAN SISTEM KEPARTAIN DAN PEMILU DI INDONESIA

A. Proses Pembentukan Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti terdapat tiga teori yang menjelaskan proses pembentukan partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kaangan (legelati dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Kedua teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori ini menjelaskan bahwa manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana ini menjadi masyarakat moderen yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk, karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan meluasnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Artinya perubahan-perubahan ini

mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan politik yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa, dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk.

Ketiga teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori ini modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan akan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Menurut Lion Epstein² partai politik adalah sekelompok orang yang berupaya memilih pemimpin pemerintahan di bawah label tertentu. Sedangkan Duvurger³ mengatakan, sistem partai diartikan sebagai sejumlah partai di dalam suatu negara selama masa tertentu, bersama dengan struktur internal, ideologi, ukuran, aliansi, dan tipe oposisi mereka.

B. Perkembangan Sistem Kepartain di Indonesia

Berkembangnya sistem kepartaian di Indonesia, di dibarengi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat dikoordinasi dengan baik, dengan sendirinya menyebabkan banyaknya usaha dari elit politik yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan pribadi dari para atau kelompok di atas kepentingan rakyat. Suatu sistem kepartai disebut adabtabel apabila ia mampu menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu kesepakatan bersama yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, jumlah partai sangat menentukan keefektifan partai politik dalam mengkoordinasikan berbagai aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak atau rakyat.

² Epstein, dalam Cole, dalam Ibid, halaman, 248

³ Duvurger (1972:18), dalam Cole, dalam Ibid.

Sistem kepartaian yang efektif sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas, pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekesrasan. Kedua mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang di hadapi oleh system politik. Dengan demikian , system kepartai yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosudur yang melembaga untuk mengasimilasikan kelompok – kelompok baru kedalam system politikk.

Menurut Peter Mair (2009) sistem keparatai adalah pola kompetisi terus menerus dan bersifat stabil, yang selalau tanpak pada setiap proses pemilu setiap negara. Sistem kepartai bergantung pada setiap system politik yang ada di dalam suatu negara dan bergantung pada kemajemukan suku, ras, idilogi, ekonomi dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat keragaman kepentingan yang ada di negara tersebut , semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu system politik yang telah disebutkan turut mempengaruhi system kepartai yang ada. Sistem kepartai belum menjadi seni politik yang mapan artinya tata cara melakukan klasifikasi system kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan banayak di lakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetsisi dalam system politik.

Terdapat berbagai cara melakukan klasifikasi system kepartaian menurut para ilmuan politik dinataranya adalah, menurut Duverger (1998) melakukannya menurut jumlah partai, yaitu system satu dan dua partai, seta system multi partai. Robert Dhal (1974) menurut skala kompetisi yang opositif. Blondel melakukan menurut ukuran jumlah dan besar partai secara relative. Rokkan menurut jumlah partai, kadang-kadang satupartai mayoritas, dan distribusi kekuatan-kekuatanpartai-partai minoritas. Giovani Sratori (1998) menurut jumkah poartai dan jarak idiologi antar partai tersebut. Mair menyebut klasifikasi Giovani Sratori sebagai yang paling dekat untuk di gunakan. Alasannya adalah, pertama klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan dapat diterapkan dalam kasusu-kasusu emperis.

Kedua, ia dapat diterapkan dinegara-negara dengan jumlah dan system kepartai berbeda. Mislanya, Amerika Serikat yang memiliki system dua partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), Malaysia satu partai berkuasa (UMNO), Jepang yang satu partai berkuasa (Liberal Demokrat). Ketiga Klasifikasi tersebut tetap memperhatikan pola –pola kompetisi dan interaksi antar partai dan cocok dengan pengertian system kepartaian . Keempat ia mengaitkan antara perilaku pemilih dengan hasil pemilihan.

Sistem dua partai menurut Sartori adalah system kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan ideologi yang tidak terlalu jauh. Mislanya, terjadi di Inggris, yang meskipun banyak partai berdiri, hanya dua partai yang eksis di setiap pemilu, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, yang partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir di setiap pemilu, yang kemudian memegang kendali pemerintahan Pluralisme moderat adalah system kepartaian yang dilandasi dengan pluralism terbatas dan ideologi antarpartai yang tidak terlampaui jauh. Hal ini terjadi di Denmark Pluralisme terpolarisasi adalah system kepartaian yang ditandai dengan pluralism ekstrim dan besarnya jarak ideologi antarpartai. Hal ini terjadi di Italia selama tahun 1970 –an dan Chili sebelum kudeta tahun 1973. Partai berkuasa adalah system kepartaian yang hanya ditandai dengan adanya satu partai yang selalu memenangi kursi di Parlemen. Hal ini terjadi di Malaysia, India, dan Jepang. Partai yang ikut pemilu memang banyak tetapi yang menang hanya itu-itu saja.

Menurut Maurice Duverger (1967:207) dalam bukunya *Political Parties*, klasifikasi system kepartaian dapat di bedakan menjadi tiga bentuk adalah sebagai berikut :

1) Sistem Partai Tunggal (One Party System)

Sistem partai tunggal terjadi jika dalam suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang berperan dalam kurun waktu yang sangat lama. Keberadaan system partai tunggal ini disebabkan hanya terdapat satu partai politik yang dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat atau pada awalnya terdapat beberapa

partai politik (multy party, two party system), tetapi dalam perkembngannya hanya terdapat satu partai politik yang selalau memenangkan mayoritas suara dalam sertiap pemilu. Partai ini menjadi dominan dan menjadikan partai politik yang lain hanaya sebagai pelengkap dan tidak berperan.

Kecendrungan untuk mengambil system partai tunggal kaena di negara-negara baru para pemimpin sering diperhadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan , suku, etnis, daerah, yang bercorak hitrogen. Kehawatirabn timbul bahwa keragaman social dan budaya dibiarkan dapat timbul gejolak –gejolak social politik yang dapat mengmbat kelancaran proses pembngunan di suatu negara.. Ciri keberdaan system partai tunggal ini dalam suatu negara adalah kehidopuan politik yang timbul penuh debgan suasana nonkompetitif. Dalam keadaan seprti ini partai politik akan sulut untuk bersaiang dengan partai politik yang selalu mendominasi kehidupan partai politik dinegara tersebut. Sistem partai tunggal ini terdapat pada negara komunias seperti Rusia,Cina

Kelemahan system ini adalah :

1. Tidak pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM karena system ini seallau bersamaan dengan system kediktatoran yaitu kekuasaan legeslatif, ekskutif dan yudikatif berada pada satu tangan sehingga pelaksanaan kekuasaannya berlaku sewenanag-wenanag.
- 2) Tidak tercapainnya perwujudan masyarakat yang sejahtera
- 3) Tidak adanya system control social
- 4) Sistem ini tidak mengakui doktrin-doktrin demokrasi

2.Sistem Dwipartai

Sistem dua partai adalah dalam suatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan berkompetisi dalam pemilu. Dalam system dua partai ini terdapat partai yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan kedua terdapat partai politik yang menjadi oposisi karena kalah dalam pemilu. Partai oposisi

berperan sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan yang selalu memberikan kritikan dan berbagai pemikiran konstruktif, serta mengontrol partai yang menguasai pemerintahan di suatu negara. Misalnya di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut Budiardjo sistem dua partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat yaitu : komposisi masyarakat homogen, 2. Consensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan social yang pokok kuat, 3. Adanya konstittuitas sejarah.

Kelebihan system ini adalah sebagai berikut :

- 1) .Suara pemilu di hasilkan selalu mayoritas
- 2) Terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah di tetapkan
- 3) Pergantian pemerintahan dalam system cenderung berjalan norma;l
- 4) Program-program pemerintah cenderung berjalan dengan baik
- 5) Adanya keterikatan pada konstitusi negara.

3.Sistem Multypartai

Dalam negara dengan system multi partai terdapat beberapa partai politik yang hampir sama kekuatannya. Tiap-tiap partai politik mempertahankan politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan tertentu dan memiliki ideologi politik yang beragam. Dalam sistem multi partai tidak ada satu partai yang dominan untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga membentuk koalisi dengan partai politik lainnya. Demikian pula partai yang berkolaborasi harus pandai mengadakan kompromi dengan partai-partai lainnya karena kemungkinan adanya dukungan dapat di tarik. Pada umumnya keanekaragaman ras, agama, suku bangsa, dan daerah cenderung berkembang kearah pembentukan system multi partai sehingga lebih mencerminkan kemajemukan masyarakat. Apabila dalam system multi partai tidak ada partai yang dominan, kestabilan politik sulit untuk di pertahankan.

Sistem multipartai dianut oleh negara Indonesia, Prancis, dan Malaysia dan Belanda, dan Swedia. Sistem ini lebih menaankan pada peran di legislatif sehingga peranan lembaga eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi. Kelemahan system ini adalah :

- 5) Pemerintahan dalam keadaan tidak stabil
- 6) Program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif
- 7) Ideologi partai tidak lagi melandasi konstitusi negara
- 8) Mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara
- 9) Setiap individu di berikan kesempatan menjadi pemimpin.
- 10) Kontrol lebih banyak dilakukan oleh parpol
- 11) Memberikan alternatif banyak pilihan pada masyarakat.

C.Sistem Kepartain di Indonesia

Dalam konstitusi Bangsa Indonesia (UUD 1945) pasal 6A ayat menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini terlihat bahwa Indonesia menganut system multi partai karena yang berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lainnya.

Kenyataannya Indonesia telah menjalankan system multi partai sejak memperoleh Kemerdekaan yaitu melalui Surat Keputusan wakil Presiden M. Hatta No. X/1949 merupakan proses dilaksanakannya system multipartai di Indonesia. Keputusan ini juga dalam rangka mempersiapkan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti oleh 29 parpol. Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI dengan perolehan suara 22,32%, Masyumi dengan dukungan suara 20,92%, NU dengan perolehan suara mencapai 18,41%, PKI memperoleh dukungan suara sebesar

16,36%, PSII memperoleh 2,89%, Parkindo memperoleh 2,66%, PSI memperoleh 1,99% , partai Katolik memperoleh 2,04% dan IPKI memperoleh 1,43% suara.

Sejak Presiden Soeharto berkuasa pada tahun 1967, partai politik dianggap sebagai penyebab ketidaksatabilan politik yang terjadi pada tahun 1950 an sampai dengan tahun 1960 an. Oleh Karen aitu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik . Pada pemilu pertama masa Orde Baru, tahun 1971, terdapat 10 partai politik , termasuk partai Golkar yang merupakan partai pemerintah yang berkuasa yang ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974 Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi terhadap partai politik, yaitu melakuakn pnyederhanan partai politik. Hasilnya hanya tiga partai politik yaitu Golongan Karya (GOLKAR) sebagai partai yang dibentuk oleh Orde baru dan sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang berbasis sosialis dan demokrasi selanjutnya menjadi PDIP di masa era refrmasi saat ini, dan Partai Persatuan Pembnguann (PPP) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang berdidologi keislaman seperti Masumi, Permusi, NU, Perti, dan PSSI. Sedangkan hasil gabungan dari partai politik yang berbasis nasionalis dan non Islam yaitu PNI,IPK, Parkindo dan Katolitik dibentuk menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dengan adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang di tandai dengan menguatnya leberalisme dalam semua sector kehidupan berbagsa dan bernegara, yang juga pada bidang politik yaitu mengutanya leberalisasi politik, yang bukan hnaya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia, memberikan ruang akpreasi bagi masyarakat untuk membentuk partai politik dalam rangka merepresentasikan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Liberaliassi politik dilakuakn karena karena partai politik di masa Orde baru tidak maksimal dalam melkasanakan peran dan fungsinya, dan belum meepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Kecendrungan ini terlihat pada terbentuknya 200 partai politik dalam masyarakat. Dari ratusan parpol terbentuk hanya 46 partai

politik yang berhasil mengikuti pemilu pada tahun 1999. Pada pemilu ini beberapa partai politik yang memperoleh dukungan suara yang signifikan adalah PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

Pada pemilu tahun 2004 jumlah partai politik mengalami distorsi atau berkurang menjadi 24 partai politik. Pada pemilu tahun 2004 diberlakukan ambang batas parlemen (parliament threshold) yaitu 2% jumlah kursi di DPR. Bagi partai politik yang berhasil memperoleh dukungan suara mencapai 2% maka berhak memperoleh kursi di parlemen nasional. Pemilu 2004 dan 2009 menghasilkan tujuh partai politik yang berhasil mendapat dukungan suara yang signifikan sehingga mencapai ambang batas parlemen adalah Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Pada pemilu tahun 2014 jumlah partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen nasional adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, PKS, PKB, PPP, PAN, dan Partai Hanura.

BAB.III

IDILOGI DAN PROGRAM PARTAI POLITIK

A. Defenisi Idiologi Politik

Idiologi adalah bagian dari kekuatan kompleks yang berusaha mempertahankan atau menggantikan struktur politik (Dion,1959). Idiologi politik adalah alat atau cara untuk mendapatkan kekuasaan , atau menurut istilah Anthony Downs mendapatkan suara (getting voters). Idiologi politik, tidak ubannya idiologi social, idiologi politik termanifestasikan dalam institusi politik. Sehingga idiologi politik merupakan suatu bentuk yang merupakan gabungan dari atau aspirasi para anggota yang menyusun institusi politik bersangkutan.

Menurut Steger (2002) mendefenisikan idiologi sebagai suatu system sebaran ide, kepercayaan, yang membentuk system nilai dan norma serta system pertauran ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. Dan ketika dikemas untuk mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat agar dapat mempengaruhi kebijakan publik, dapat dikatakan bahwa idiologi tersebut adalah idiologi politik. Biasanya perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan politik dalam system demokrasi dimanifestasikan dalam bentuk institusi formal politik, yaitu partai politik.

Menurut Lane idiologi politik dapat dilihat dari berbagai ciri dinatarnya adalah sebagai berikut

1. Idiologi politik berkaitan dengan pertanyaan siapa yang memimpin? Bagaimana mereka dipilih? Dan dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin?.
2. Idiologi mengandung banyak sekali argument persuasi atau melawan ide-ide yang berlawanan.
3. Idiologi sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia., aspek ekonomi, kesejahteraan pendidikan, kesehatan dll.

4. Idiologi sangat terkait dengan hal-hal peniting daalm kehidupan social, Bik mwngajukan program atau menentangny
5. Idiologi mencoba merasionalisasi kepentingan kelompok sehingga kepentingan tersebut sangat beralasan dan layak diperjuangan.
6. Idiologi berisikan hal-hal yang bersifat normative, etis dan moral.

Menurut McClosky (1964:362) mendefenisikan idiologi politik sebagai kesatuan system yang terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi penggunaan kekuasaan. Tidak hanya itu, idilogi politik jug asangat berperan dalam memaknai berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat..Idiologi politik juga dapat berperan sebagai jembatan atau penghubung anantara dunia politik dengan bidang lain seperti bidang ekonomi,pendidikan, kesehatan, keadilan, budaya, dan pertahanan keamanan.

Menurut Geertz (1973:220) idiologi politik dari prespektif sosiologi adalah visualisasi kenyataan social yang sekaligus membngkakitkan kesadaran social. Isu-isu politik yang dicanangkan partai politik, menurut definisi ini, sebaiknya mencerminkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekaligus mampu menydarkan publik akan adanya persoalan mendasar yang dialami bangsa dan negara, sedangkan Sartori melihat idiologi politik yang sebuah dogma atau doktrin. Steger (2002) idiologi politik menurut berbagai kalangan social politik adalah suatu metafora yang berfungsi sebagai lensa atau filter, dimana kita dapat menggunakannya untuk memilih dan menjelaskan pemahaman kita tentang dunia dan orang-oang yang ada didalamnya. Hal ini juga dianggap sebagai metode penyederhanaan(simplifications) atas proses interpretasi yang kita lakukan terhadap realitas dunia.

B. Idiologi Sebagai Identitas Partai Politik

Idiologi politik juga dapat digunakan sebagai identitas karakteristik suatu partai politik, sehingga semua orang terutama para pemilih yang berhak memberikan suara dapat dengan mudah membedakannya dengan partai politik lain. Dalam kaitan ini idiologi politik adalah basis sistem nilai dan paham yang menjelaskan mengapa suatu partai politik harus ada. Selain itu idiologi politik juga sebagai basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu partai politik. Dengan demikian seharusnya idiologi politik harus melekat pada suatu partai politik. Agar dapat dikatakan sebagai pengaut idiologi tertentu, suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma, harus tercermin dalam semua aspek organisasi partai politik bersangkutan.

Idiologi politik sebagai identitas partai politik juga dalam rangka membantu pemilih untuk menentukan sikap politik atau keberpihakan mereka terhadap suatu partai politik. Memang, cara para pemilih memberikan suara dalam pemilu merupakan suatu proses yang kompleks. Hal ini menjadi ruwet apabila ketidakjelasan identitas masing-masing partai politik. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa membedakan satu partai dengan partai lainnya. Hal yang mungkin terjadi masyarakat akan menjadi apatis, golput atau menyederhanakan proses pemberian suaranya. Misalnya perilaku politik masyarakat pemilih lebih cenderung melihat pada faktor figurinya atau calon yang diusung oleh partainya dari pada memilih partai politiknya.

Idiologi politik partai juga sangat berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena di masyarakat cenderung berorientasi pada pengaruh idiologi politik partai sehingga memberikan dukungan suara lebih berdasarkan pada idiologi politik yang digunakan oleh partai politik yang berkompetisi. Hal ini terlihat pada berbagai partai politik yang ada di Indonesia dengan menggunakan beragam idiologi politik. Misalnya pada pemilu tahun 2019 kemenangan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena memiliki idiologi politik nasionalis

demokrasi dan sosialis. Sehingga basis dukungannya lebih berasal dari segmentasi masyarakat yang berideologi sosialis terutama di Jawa Tengah. Sedangkan partai Gerinda yang memperoleh dukungan politik yang signifikan pada urutan kedua, juga menggunakan ideologi politik Nasionalis, demokratis dan sosialis yang berbasis pada pendukungnya lebih berorientasi pada masyarakat yang berideologi demokrasi dan sosialis. Hal yang sama juga pada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional yang menggunakan ideologi politik nasionalis religius dengan basis pendukung utamanya adalah masyarakat keislaman sehingga memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan dengan ideologi nasionalis keislaman juga mendapat dukungan yang signifikan dalam pemilu.

Ideologi politik partai adalah dimensi yang kompleks, oleh karena itu untuk menganalisis ideologi politik partai diperlukan pendekatan yang komprehensif. Dari aspek isi orasinya figure yang ditampilkan, visi dan misi partai politik, strategi politik partai, struktur organisasi partai, media komunikasi, dan isu-isu politik yang ditawarkan kepada publik. Ideologi partai politik pun juga dapat dicermati hal-hal yang bersifat non organisasional atau individual seperti cara berpakaian, bahasa tubuh dan karakter fungsionalis partai, serta kandidat yang akan diusung.

1. Visi dan Misi Partai Politik

Partai politik yang didirikan untuk memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat sehingga memberikan kejelasan institusional atas perjuangan dan aspirasi mereka. Jadi penderian suatu partai politik didahului oleh visi yang jelas tentang mengapa partai politik dibentuk. Pernyataan visi ini juga terkait dengan nilai dan paham ideologi yang dianutnya serta memberikan landasan bagi perjuangannya. Sedangkan misi partai adalah tujuan jangka pendek dan tujuan panjang partai politik. Misi adalah pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan oleh partai politik. Kejelasan tujuan

jangka pendek dan jangka panjang ini juga akan membantu bagi penyusunan tujuan antara maupun strategi untuk mencapainya.

2. Strategi Partai Politik Dalam Pemilu

Strategi partai diperlukan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan antara dan jangka panjang. Strategi politik partai dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu :

1. Strategi partai politik yang terkait dengan mobilisasi dukungan masa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kemenangan suara partai politik atau kandidat yang diusungnya. Melalui kemenangan suara, suatu partai politik atau kandidatnya akan dapat mengarahkan kebijakannya dinegara bersangkutan agar sesuai dengan tujuan dan cita-citanya, sehingga bentuk dan struktur masyarakat ideal yang diinginkan akan dapat terwujud.
2. Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak koalisi itu konsisten dengan ideologi partai politik yang mengajak berkolaborasi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis yaitu memenangkan pemilu. Terkait dengan koalisi politik, di negara yang menggunakan sistem multi partai cenderung membangun koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Koalisi politik yang cenderung dibangun adalah lebih berdasarkan pada kesamaan kepentingan politik, ideologi politik, dan kesamaan kebijakan politik atau program politik.

Kebijakan Politik Partai

Idiologi politik juga tercermin dalam kebijakan partai politik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Platform partai tentang permasalahan bangsa menjadikan tolak ukur yang penting dalam implementasi ideologi partai. Cara suatu partai politik dalam melihat, menganalisis, dan mengajukan solusi atas berbagai permasalahan bangsa mencerminkan ideologi yang dianutnya. Misalnya apabila partai politiknya berhaluan kapitalis, mereka

cenderung memberikan solusi dalam hal menurunkan pajak dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Sementara, ketika partai politik berhaluan sosialis, program-program yang mereka ajukan akan cenderung meningkatkan pajak, distribusi pendapatan dan meningkatkan campur tangan pemerintah dalam sector ekonomi. Perbedaan mendasar yang menyangkut arah kebijakan partai politik sangat jelas ditentukan oleh ideologi politik yang anut oleh masing-masing partai politik.

Sementara itu kebijakan partai politik juga dilakukan secara internal. Misalnya dalam penyusunan sistem reward dan punishment partai politik. Cara partai politik dalam memberikan penghargaan pada elit partai yang berprestasi dan menghukum fungsionaris atau elit partai yang melkaukan kesalahan merupakan implementasi ideologi yang dianutnya. Sedangkan sistem kaderisasi mengikuti ideologi politik yang berlaku di partai politik bersangkutan. Misalnya kalau ideologi partai adalah pembangunan maka kaderisasi yang dilakukan adalah menanamkan semangat membangun di segala aspek kehidupan.

Platform atau Program Partai Politik

Salah satu materialisme ideologi adalah platform partai politik. Hal ini berkaitan dengan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam konstruksinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Hal ini berkaitan dengan program kerja dan isu politik. Platform suatu partai juga dapat disebut sebagai semangat dan komitmen dalam memberikan kontribusi terhadap permasalahan bangsa dan negara, selain itu juga terkait dengan hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik. Juga berkaitan dengan tujuan dan prinsip dasar partai politik bersangkutan. Misalnya PKS menjadikan asas Islam sebagai asas partai. PKS bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridahi oleh Allah SWT, dan berdasarkan pada Pancasila.

Sedangkan partai Demokrat memiliki platform partai nasionalis demokratis, hal ini tercermin dalam pernyataan asas kepartian yang secara terang-terang menyebutkan Partai Demokrat berdasarkan Pancasila. Tujuan partai Demokrat adalah mewujudkan partisipasi rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan yang modern dan berjiwa nasionalis religius dalam rangka membangun Indonesia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Sedangkan terkait dengan isu politik, harus berangkat dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Isu politik merupakan topik dan bhasan yang mencerminkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Konsekwensilogisnya partai politik harus terus menerus mengupdate data dan informasi tentang kondisi yang dihadapi masyarakat. Partai politik diharapkan berperan aktif dalam menganalisis berbagai permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi alternatif atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

BAB.IV

POSITIONING DALAM PERSINGAN POLITIK

Dalam negara yang memiliki system yang demokrasi, persaingan dalam dunia politik tak bisa di hindarai. Dalam rangka mmeproleh kekuasaan politik di lembaga-lembaga politik partai politik atau elit politik, harus berkompetisi atau bersaiang dengan parpol, atau elit politik yang lainnya. Bahkan di negara yang memiliki system pemerintahan yang totaliter seperti di Rusia dan China pun,, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Persaingan politik merupakan kodrat alamiah yang harus ditempu untuk mencapai kekuasaan politik. Persaingan adalah sesuai yang bersifat harafiadan terjadi dimana-mana, kita dapat mengatakan bahwa persaingan untuk kuasa ada dimana-mana. Menurut Nietszche sudah menjadi kudrat manusia harus mengusung kehendak untuk berkuasa dan mempertahankan diri dalam pola-polapersaingan di setiap level kehidupan.

1.Sumber Daya

Untuk berkuasa di butuhkan sumberdaya hal ini berkaitan dengan semua factor input yang memfasilitasi actor-aktor social untuk merealisasikan keinginan, tugas dan kewajibannya. Sulit di bayangkan bahwa seorang actor politik dapat merealisasikan ide dan gagasannya , tujuan politik dan tugas sosialnya tanpa sumberdaya apapun. Pihak-pihak yang dapat akumulasi sumberdaya akan memiliki peluang dan kesempatan untuk berhasil di bandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Dalam dunia politik., kemampuan untuk mengakumulasi dan mendapkan sumberdaya politik menjadi suatu factor yang sangat penting. Orang-orang yang mampu membangun, mengumpulkan dan mengeksploitasi sumberdaya politik pastilah memiliki posisi tawar meanawar politik yang tinggi bandingkan dan yang tidak

2. Informasi Politik

Informasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan politik. Pentingnya peranan informasi dalam mendominasi atau menentukan keberhasilan politik. Aktivitas politik adalah serangkaian kegiatan yang berlandaskan pengumpulan, analisa dan penggunaan informasi untuk mengambil keputusan politik. Baik buruknya kualitas keputusan politik sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang di terima. Pada konteks ini informasi politik dapat dilihat dari decision support. Mendapatkan informasi politik akan mempengaruhi keputusan politik yang tepat.

3. Sumber Daya Finansial Politik

Keuangan politik merupakan hal esensial untuk menjamin aktifitas politik yang berkelanjutan, peran dan kontribusi sumberdaya ini sangat penting karena hampir setiap ruang gerak aktivitas politik membutuhkan pendanaan, mulai dari sewa gedung kantor pusat parpol, peralatan kantor, rapat politik, sampai ke bentuk-bentuk kampanye, baik semasa pemilu, ataupun non pemilu sangat membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan politik bisa diperoleh dari beragam sumber dari yang sifatnya wajib, (setoran kader yang ada di DPR) sampai kepada pihak-pihak yang bersimpati pada perjuangan politik, suatu partai atau kandidat. Selain itu juga sumbangan dalam bentuk bantuan fisik seperti gedung dan bangunan, mobil, serta akses ke media.

4. Sumber Daya Manusia

Organisasi apapun bentuknya di gerakan oleh manusia bukan oleh system, prosedur dan mesin. Perangkat ini tidak dapat berfungsi dengan baik, jikalau tidak ada sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu partai-partai politik saling berkompetisi untuk merekrut orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat. Dengan adanya orang-orang atau elit-elit politik, ekonomi, dan social budaya, yang memiliki kapasitas, popularitas, dan elektabilitas yang tinggi, serta memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat,

direkrut menjadi pengurus partai politik, akan berpengaruh terhadap kinerja partai politik, dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat untuk memberikan dukungan politik partai politik tersebut dalam pemilihan umum. Proses rekrutmen politik yang dilakukannya oleh partai politik, juga harus didasarkan pada figure-figur yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang politik, memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasi politik, dan orang-orang yang memiliki integritas politik yang baik. Pada konteks rekrutmen politik, juga harus dilaksanakan dengan proses pengkaderan yang efektif, karena dapat mengakibatkan berbagai resiko yang dialami oleh partai politik. Pertama, ketidaksesuaian paham ideologi, antara orang yang direkrut dengan partai politik bersangkutan. Kedua, terjebaknya suatu partai politik pada pragmatism jangka pendek yang menjadikan organisasi partai politik sebagai kendaraan untuk berkuasa.

5. Teknologi Organisasi

Pada konteks ini teknologi didefinisikan sebagai semua perangkat, baik keras maupun lunak, yang dapat membantu manusia untuk efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Teknologi dapat berupa semua bentuk hard dan soft technology. Dunia politik perlu memperhatikan dua jenis teknologi ini. Pertama, kehadiran teknologi keras, seperti satelit, internet, komputer super canggih dan media komunikasi lainnya. Dalam konteks perkembangan demokrasi saat ini cenderung menggunakan teknologi keras dalam membangun komunikasi politik. Selain itu juga organisasi partai politik juga harus menggunakan teknologi lunak dalam hal ini adalah sistem dan prosedur yang membuat partai politik menjadi efektif dalam mengelola berbagai programnya. Misalnya good corporate governance, transparansi, decision support system dan penilaian kinerja partai politik, menurut masyarakat, merupakan perkembangan teknologi dalam dunia modern yang perlu diadopsi oleh partai politik.

6. Perhatian dan Dukungan Publik

Sebenarnya yang dikompersisikan adalah upaya untuk merebut perhatian dan ketertarikan masyarakat terhadap ideologi dan produk politik dari suatu partai politik atau calon kandidat merupakan tahap awal untuk mendapatkan simpati dan dukungan dalam kaitan ini peranan media masa baik TV, radio, dan media cetak merupakan factor penting dan berpengaruh. Hal ini disebabkan karena melalui media informasi mengenai seseorang kandidat dan suatu partai politik dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi bahwa sebenarnya arena pertempuran adalah opini publik. Oleh karena itu, bagaimana mengawal dan membentuk opini publik agar menuju kearah yang dikehendaki. Selain itu baik partai politik maupun kandidat selalu bersiap-siap untuk mengkanter kepada pihak-pihak yang menmbnagun opini negatif atau black campaign dan mendistrikan partai atau dirinya. Pemberitaan yang negatif bisa menjauhkan parpol atau kandidat dari publik atayu masyarakat.

Persaingan politik menemukan intensitasnya menjelang pemilu, dalam kesempatan ini masing-masing pihak berusaha untuk memkasimalkan pengaruh mereka daalm menarik perhatian dan dukungan suara pemilih. Kemenangan politik biasanya diukur dari seberapa besar perolehan suara yang di dapat pada sat pemilu. Hal ini disebabkan karena pada pemillah yang menentukan seorang kandidar atau parpol menjadi pemenang atau tidak . Besar kecilnya suara semasa pemilu merupakan pencerminan apakah satu partai politik atau konstestan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

7. Segemntasi pemilih

Segmentasi politik diartikan sebagai suatu proses ifentfikasi dan klasifikasi masyarakat kedalam kelompok-kelompok yang tujuan politiksendiri-sendri. Tidak adanya segmentasi politik daalm suatu organisasi politik akan membuatnay kehilangan arah sdaalm membangun hubungan denagn masyarakat.. Program

kerja yang disusun mungkin saja akan kehilangan efektifitas, sebab pesan dan produk politiknya sulit untuk dipahami atau tidak tepat sasaran.

Menurut Niffenegger, 1989, Smit, & Hirst, 2001, sebuah institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memetakan struktur dan karakteristik masyarakat. Pemetaan bisa dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di suatu wilayah, penyebarannya, kondisi fisik geografisnya. Pemetaan juga bisa dilakukan secara demografis dimana, pemilih dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman akan dunia politik, kepercayaan agama, dan etnis. Pemetaan juga didasarkan pada keberpihakan pemilih misalnya berapa pendukung tradisional, pendukung partai lain, dan seberapa besar masa mengambang, dan mungkin juga persentase pemilih yang golput.

Menurut Smith & Hirst (2001) juga berpendapat bahwa : perlunya segmentasi politik disebabkan beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua segmen pasar harus dimasuki, hanya yang memiliki ukuran jumlah yang signifikanlah yang menjadi perhatian.
2. Sumber daya partai politik bukanlah tidak terbatas. Seringkali partai politik harus melakukan aktivitas yang menjadi prioritas utama saja mengingat keterbatasan sumber daya.
3. Terkait dengan efektifitas program komunikasi politik yang akan dilakukan. Masing-masing segmen memiliki karakteristik yang berlainan. Kenyataan mengharuskan bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap suatu kelompok harus berbeda dengan kelompok lainnya. Hal ini memudahkan identifikasi masyarakat terhadap analisis suatu partai politik yang akan didukung.

Bagai parti politik yang akan bersaing, segemntasi politik akan berguna untuk:

1. Membantu identifikasi kepentingan dan tujuan politik masing-masing kelompok masyarakat.
2. Membantu partai politik untuk lebih meningkatkan ketepatan program kerja dan isu politik disetiap kelompok masyarakat.
3. Membantu partai politik dalam mengembangkan komunikasi politik, mengingat masing-masing kelompok masyarakat memiliki cara berfikir yang berbedaoleh karena itu komunikasi politik harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik disetiap kelompok dalam masyarakat
4. Membantu dalam analisis atas persaingan partai politik. Mislanya pendukung dan non pendukung dan masa mengembng. Melihat jumlah yang ada disetiap segmen akan membantu partai politik dalam menghitung probabilitas untuk menang atau kalah.
5. Untuk mengembangkan program marketing politik yang lebih tepat sasaran dan komprehensif. Mislanya strategi advertising dan distribusi pesan serta informasi politik.

Strategi Segemntasi Pemilih

Terdapat beragam teknik dan metode bagi partai politik untuk mengkalsifikasi dan megelompokan masyarakat. Metode dan teknik berangkat dari suatu premis bahwa individu cenderung untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang berbagai karakteristik sama inulah yang memebntuk suatu kelompok masyarakat. Mereka memiliki ciri, sifat, kondisi, psikologis, kepentingan, harapan, permasalahan dan tujuan hidup yang relative sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terdapat dalam kelompok mereka.

Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah dimensi karakteristik. Ketika partai ingin melakukan identifikasi kelompok-kelompok dalam masyarakat mereka dapat melakukannya dengan menggunakan kedekatan karakteristik. Teknik segmentasi dapat dilakukan dalam dua kategori pertama faktor-faktor yang bersifat meniadakan. Pengelompokan masyarakat dalam hal ini dapat menggunakan kedekatan geografis, demografi, psikologis, perilaku, dan kondisi sosial. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kondisi struktur masyarakat akan memengaruhi perilaku psikis orang-orang yang terdapat didalamnya.

Misalnya berdasarkan pendekatan geografis, kita dapat membedakan perilaku masyarakat pegunungan dengan masyarakat pesisir. Masyarakat pegunungan kurang berinteraksi dengan dunia luar, sedangkan masyarakat pesisir cenderung berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini disebabkan karena pelabuhan-pelabuhan merupakan tempat persinggahan orang-orang dari dunia luar. Pada konteks ini masyarakat pesisir lebih cenderung terbuka dari masyarakat pegunungan.

Karakteristik masyarakat dari cara bereaksi terhadap suatu masalah. Segmentasi ini berangkat dari suatu asumsi bahwa yang lebih menentukan sikap seseorang atas suatu permasalahan bukan kondisi struktur sosial masyarakatnya melainkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Sedangkan segmentasi sebab akibat sudah mengelompokkan masyarakat berdasarkan pada reaksi mereka terhadap suatu permasalahan. Ketika diperhadapkan dengan isu global atau perdagangan bebas terdapat tiga kelompok yang kemungkinan muncul.

Pertama, kelompok masyarakat yang mendukung perdagangan bebas, mereka melihat bahwa persaingan bebas yang dapat menciptakan efisiensi perekonomian dan akan terjadi penemuan baru. Kedua, pihak-pihak yang netral dan tidak menentukan pilihannya mereka mengatakan perdagangan bebas tidak berpengaruh terhadap apa yang sedang dilakukan. Ketiga, pihak-pihak yang menentang dan menghujat perdagangan bebas, mereka beranggapan bahwa ini akan mematikan spesialisasi daerah, selain juga kaum kapitalis akan lebih dominan bahkan menindas perekonomian daerah dan rakyat.

Positioning politik

Positioning dalam marketing politik didefinisikan sebagai semua aktivitas yang dimaksudkan untuk menanamkan kesan di benak para konsumen agar mereka bisa membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh partai politik dengan partai lainnya. Dalam positioning produk dan jasa akan direkam dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian konsumen akan dengan mudah mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu partai dengan partai lainnya. Semakin tinggi image yang direkam dalam benak konsumen, semakin mudah pula mereka mengingat image produk dan jasa bersangkutan.

